

Perkembangan Diplomasi Ekonomi Indonesia Terhadap Tiongkok dalam Kerjasama Meningkatkan Ekspor *Crude Palm Oil* Tahun 2020-2023

**Suci Cantika, Ully Nuzulian, Adibrata Iriansyah,
Nurfitri Nugrahaningsih, Dewi Suratiningsih**
Universitas Tanjungpura

Abstrak

Kegiatan perdagangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) tahun 2020-2023 Indonesia ke Tiongkok mengalami naik turun volume ekspor yang disebabkan oleh cuaca yang ekstrim dan harga minyak nabati serta minyak bumi yang tinggi. Dalam menganalisa isu, penulis menggunakan konsep kerjasama internasional dan teori diplomasi ekonomi, serta metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bersumber dari wawancara dan penelitian kepustakaan. Pada indikator economic salesmanship, Presiden, Kementerian Perdagangan, dan KBRI Beijing menjadi aktor yang menjalankan diplomasi ekonomi dalam peningkatan ekspor CPO. Pada indikator economic networking and advocacy, GAPKI, APKASINDO, dan GIMNI menjadi stakeholder yang paling gencar mempromosikan CPO Indonesia. Pada indikator image building, Indonesia membangun citra positif perkebunan kelapa sawit dengan membuat sertifikat ISPO, industrialisasi komoditas CPO menjadi produk olahan, dan mengadakan seminar internasional. Kemudian pada indikator regulatory management and resource mobilization, Indonesia dan Tiongkok telah menyetujui regulasi perjanjian perdagangan bebas ACFTA.

Kata Kunci: *Diplomasi Ekonomi, Indonesia-Tiongkok; Minyak Kelapa Sawiti.*

Abstract

Indonesia's 2020-2023 Crude Palm Oil (CPO) export trade activities to China experienced ups and downs in export volumes due to extreme weather and high prices for vegetable oils and petroleum. In analyzing the issue, the author uses the concept of international cooperation and economic diplomacy theory, as well as qualitative research methods with descriptive research types sourced from interviews and library research. In the economic salesmanship indicator, the President, the Ministry of Trade, and the Indonesian Embassy in Beijing are the actors carrying out economic diplomacy in increasing CPO exports. In the economic networking and advocacy indicator, GAPKI, APKASINDO, and GIMNI are the stakeholders who most actively promote Indonesian CPO. In the image building indicator, Indonesia builds a positive image of oil palm plantations by issuing ISPO certificates, industrializing CPO commodities into processed products, and holding international seminars. Then in the regulatory management and resource mobilization indicator, Indonesia and China have agreed to the ACFTA free trade agreement regulations. In addition, both countries have their own regulations regarding CPO export and import activities that must be complied with. The results of this study indicate that the implementation of Indonesia's economic diplomacy towards China in CPO export activities has been quite good.

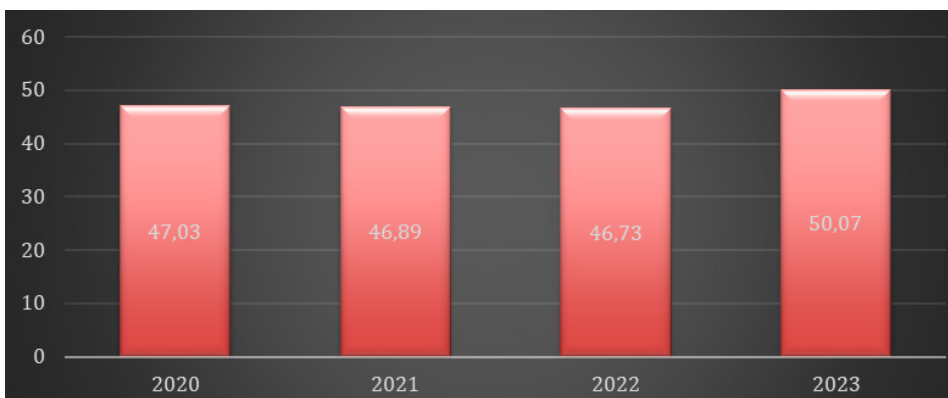
Keywords: *Economic Diplomacy; Indonesia-China; Crude Palm Oil.*

Pendahuluan

Kelapa sawit merupakan perkebunan yang sangat banyak ditanam di Indonesia. Kelapa sawit menjadi tanaman yang cukup pesat pertumbuhan produksinya. Tanaman kelapa sawit dapat menghasilkan berjuta-juta ton CPO, dimana CPO ini dapat dibuat ke berbagai produk olahan, baik itu makanan dan non makanan. Oleh sebab itu, keberadaan kelapa sawit sangat penting bagi Indonesia sebab banyak bahan makanan Indonesia yang terbuat dari minyak kelapa sawit. Dalam catatan sejarah, kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Belanda pada tahun 1848. Kelapa sawit awalnya digunakan hanya untuk tanaman hias dan baru dibudidayakan untuk komersial pada tahun 1911 (Nora dan Mual 2018). Adrien Hallet yang merupakan warga negara Belgia menjadi pengusaha perkebunan kelapa sawit pertama di Indonesia. Perkembangan kelapa sawit mulai pesat dilakukan oleh pengusaha Jerman yang bernama Schadt. Perkebunan kelapa sawit pertama di Indonesia memiliki luas 5.123 Ha yang terletak di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, saat ini luas perkebunan kelapa sawit tahun 2023 sudah mencapai 16,83 juta Ha yang dimiliki oleh Perkebunan Besar Negara (PBN), Perkebunan Besar Swasta (PBS), dan Perkebunan Rakyat (PR).

Pada saat ini, Indonesia telah menjadi negara pengeksport CPO terbesar di dunia dengan produksi minyak kelapa sawit yang sangat banyak setiap tahunnya. Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) menyebutkan bahwa pada Desember tahun 2022, produksi minyak sawit di seluruh dunia mencapai 77,22 juta ton dengan Indonesia menjadi negara produksi minyak sawit terbesar yaitu berjumlah 45,5 juta ton (Sadya 2023). Dengan angka tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia menyumbang sekitar 59% dari keseluruhan produksi minyak sawit di seluruh dunia.

Grafik 1. Jumlah Produksi *Crude Palm Oil* Indonesia (Juta Ton)



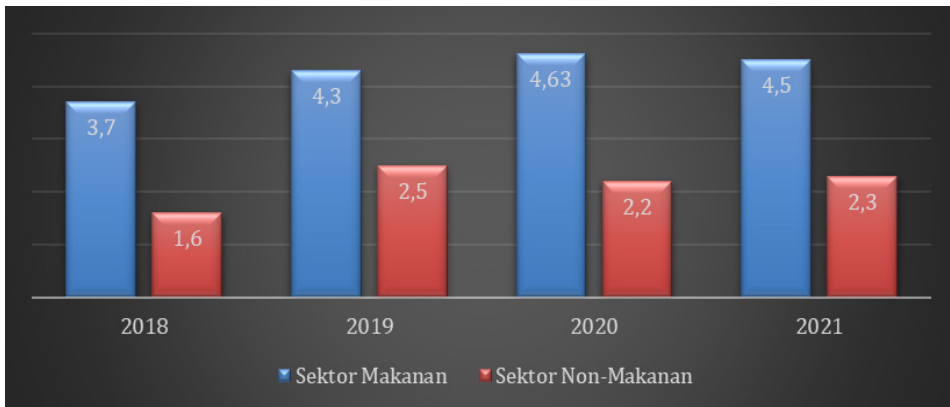
Sumber: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia 2024

Berdasarkan data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), jumlah produksi minyak sawit Indonesia sangat tinggi. Namun dari tahun 2020 hingga 2022, produksi CPO Indonesia selalu mengalami penurunan. Pada tahun tahun 2020 produksi CPO sebesar 47,03 juta ton. Lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 46,89 juta ton. Kemudian produksi CPO tahun 2022 kembali menurun menjadi 46,73 ton (Putri 2023). Namun, produksi CPO di tahun 2023 meningkat cukup banyak yaitu 50,07 juta ton. Kenaikan produksi ini disebabkan oleh harga minyak sawit yang tinggi di tahun sebelumnya sehingga mendorong perluasan area tanaman dan mendorong pembenihan kebun (Info Sawit 2024). Data tersebut menunjukkan bahwa produksi CPO Indonesia sangat banyak walaupun terdapat penurunan produksi di tahun 2020 sampai 2022.

Tingginya jumlah produksi CPO membuat Indonesia dapat melakukan kegiatan ekspor ke negara lain. Salah satu negara yang menjadi tujuan ekspor CPO Indonesia adalah Tiongkok. Adapun alasan Indonesia memfokuskan ekspor CPO nya ke Tiongkok dikarenakan negara tersebut merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia sehingga penggunaan CPO sangat besar di Tiongkok. Dengan besarnya penggunaan CPO di Tiongkok membuat Tiongkok memiliki permintaan yang tinggi untuk memasok CPO di negaranya. Dengan demikian, Indonesia melihat Tiongkok sebagai peluang yang besar dalam memperluas dan meningkatkan kegiatan ekspor CPO.

Tiongkok sebenarnya juga memiliki kelapa sawit untuk diproduksi, namun karena beberapa hambatan membuat Tiongkok tidak dapat memproduksi CPO dalam jumlah banyak. Kurangnya keahlian dibidang pertanian dan manajemen membuat produksi minyak sawit di Tiongkok tidak mengalami peningkatan dan tidak menguntungkan. Pemerintah Tiongkok mulai membebaskan petani untuk menanam apa yang diinginkan. Hal ini membuat masyarakat Tiongkok beralih menanam karet, lada, dan mangga yang mempunyai harga tinggi (Yifan 2022).

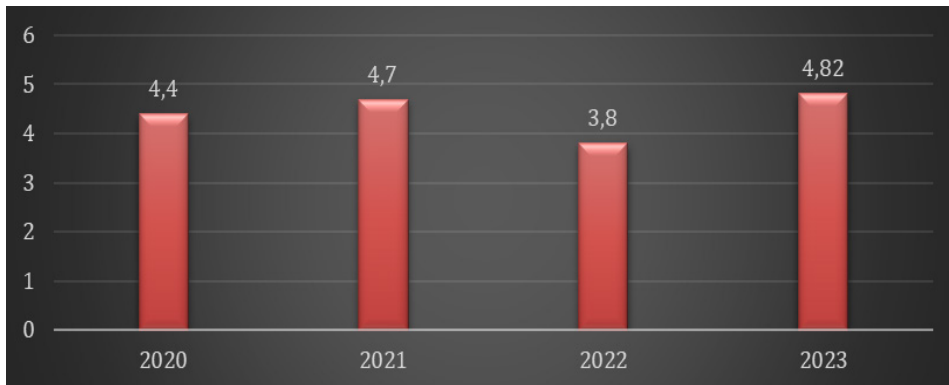
Grafik 1. Konsumsi *Crude Palm Oil* di Tiongkok (Juta Ton)



Sumber: *World Resources Institute Indonesia 2022*

Berdasarkan sumber dari *Huaon Information Network* yang diolah oleh *World Resources Institute (WRI) Indonesia*, terdapat berbagai produk Tiongkok yang dibuat menggunakan bahan dari CPO. Dalam diagram di atas terlihat bahwa Tiongkok mengonsumsi jumlah CPO yang sangat banyak setiap tahunnya. Pada tahun 2018, penggunaan CPO di Tiongkok mencapai 5,3 juta ton, tahun 2019 mencapai 6,8 juta ton, tahun 2020 sebesar 6,83 juta ton, dan di tahun 2021 sebesar 6,8 juta ton. Tentunya pemakaian CPO yang sangat banyak ini sejalan dengan besarnya jumlah penduduk Tiongkok. Konsumsi CPO yang banyak tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Tiongkok sebab Tiongkok hanya mampu memproduksi CPO dalam jumlah yang sedikit. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Pemerintah Tiongkok melakukan impor dari negara lain yaitu Indonesia. Sebagian besar CPO digunakan oleh Tiongkok pada sektor makanan (70,3%) dan sebagian kecil pada sektor non makanan (29,7%). Pada sektor makanan, CPO dibuat untuk produk margarin, mie instan, minyak goreng, dan mentega putih. Lalu sektor non makanan, CPO digunakan pada industri kecantikan seperti lipstik, pelembab kulit, dan masker wajah. Selain itu, Tiongkok juga menggunakan CPO dalam industri farmasi dan bahan bakar nabati.

Grafik 2. Volume Ekspor *Crude Palm Oil* Indonesia ke Tiongkok (Juta Ton)



Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kegiatan ekspor Indonesia ke Tiongkok mengalami dinamika naik turun. Pada tahun 2020, ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok mencapai 4,4 juta ton. Pada tahun 2021 ekspor CPO ke Tiongkok meningkat dengan total ekspor 4,7 juta ton. Namun di tahun 2022 ekspor CPO Indonesia menurun menjadi 3,8 juta ton. Penurunan di tahun 2021-2022 tersebut disebabkan oleh kondisi cuaca yang ekstrim dan harga minyak nabati serta minyak bumi yang tinggi (Pratiwi 2023). Kemudian di tahun 2023, total ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok meningkat mencapai 4,82 juta ton (Annur 2024). Dengan demikian, Indonesia harus mempertahankan pasar ekspor CPO di Tiongkok mengingat tingginya volume perdagangan sehingga menambah pendapatan yang cukup besar bagi negara Indonesia.

Urgensi dari penelitian kerjasama perdagangan CPO Indonesia dan Tiongkok adalah untuk melengkapi penelitian terdahulu yang mengkaji tentang strategi diplomasi ekonomi Indonesia ke Tiongkok pada ekspor CPO tahun 2015-2019 yang ditulis Sydney Anwar. Pada penelitiannya, Sydney menjelaskan bahwa pada tahun 2015-2019 kegiatan ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok mengalami ketidakstabilan ekspor sehingga dibutuhkan strategi agar ekspor Indonesia ke Tiongkok tidak menurun. Data ekspor CPO di tahun 2020-2023 juga mengalami ketidakstabilan ekspor. Oleh sebab itu, peneliti memfokuskan dan memilih tahun 2020-2023 untuk melihat bagaimana perkembangan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok setelah tahun 2019. Penulis berupaya melanjutkan dari penelitian sebelumnya untuk menambah wawasan bagi para pembaca umum dan akademisi yang tertarik dengan isu perdagangan CPO serta penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan atau pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan yang strategis agar perkembangan perdagangan CPO Indonesia ke Tiongkok semakin optimal di masa yang akan datang.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Saryono, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Harahap 2020). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Peneliti memanfaatkan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif untuk menjelaskan dan menggambarkan perkembangan diplomasi ekonomi Indonesia dalam upaya meningkatkan ekspor *crude palm oil* di Tiongkok. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal penting untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*) dan wawancara. Kemudian teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah model analisis interaktif yang dijabarkan oleh Huberman dan Miles yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Abdussamad 2021).

Landasan Teoritis dan Konseptual

Konsep Kerjasama Internasional

Pada dasarnya setiap negara sulit untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya tanpa menjalin kerjasama dengan negara lain. Kerjasama dipandang penting agar segala kebutuhan dapat dicapai dengan mudah. Menurut K.J. Holsti, kerjasama internasional bisa diartikan sebagai proses yang dilaksanakan oleh negara yang menjalin hubungan bersama (Putri and Nibras 2019). Beberapa faktor yang menjadi pendorong kerjasama internasional diantaranya adanya kemajuan di bidang teknologi, kemajuan pada ekonomi, keinginan untuk saling melindungi dalam bentuk kerjasama internasional, dan kesadaran untuk bernegosiasi. Tujuan dari kerjasama internasional adalah untuk mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat negaranya, meningkatkan perekonomian negara, perdagangan, investasi, menjauhi konflik, memelihara perdamaian dunia dan memperkuat jalinan persahabatan dengan negara lain.

Menurut Holsti dalam Ramadhanytyas dan Rizki (2021) bahwa terdapat beberapa alasan mengapa setiap negara harus melaksanakan kerjasama dengan negara lain, diantaranya: (1) (1) dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi dapat dilakukan dengan mengurangi tarif pajak masuk barang yang diekspor oleh negara tersebut, tentunya dibutuhkan kerjasama dengan negara tujuan ekspor untuk mengurangi tarif pajak

tersebut sehingga terjalannya kerjasama dan kesepakatan dalam mencapai tujuan tersebut; (2) meningkatkan efisiensi sehingga dapat mengurangi biaya yang diperlukan oleh suatu negara; (3) terdapat permasalahan yang dianggap membahayakan keamanan negara bersama sehingga negara-negara tersebut membentuk berbagai kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama; dan (4) memperkecil dampak negatif yang dapat merugikan suatu negara dengan negara lainnya yang dikarenakan oleh perbuatan-perbuatan individual negara.

Terkait kerjasama internasional, peneliti melihat bahwa negara Indonesia turut berinteraksi dengan negara lain yang dilakukan dengan berbagai bentuk kerjasama. Salah satu negara yang bekerjasama dengan Indonesia adalah Tiongkok. Seperti yang diketahui hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok berjalan dengan baik. Berbagai bidang kerjasama telah dilakukan oleh kedua negara, salah satunya pada bidang perdagangan. Dalam penelitian ini, Indonesia melakukan kerjasama internasional dengan Tiongkok melalui kegiatan ekspor *crude palm oil*. Kerjasama tersebut dilakukan Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara.

Teori Diplomasi Ekonomi

Pavol Baranay (2009) berargumen bahwa "*The phrase economic diplomacy assumes the diplomatic official activities that are focused on increasing export, attracting foreign investment and participating in work of the international economic organizations, i.e., the activities concentrated on the acknowledgement of economic interest of the country at the international level*". Singkatnya diplomasi ekonomi diasumsikan sebagai suatu kegiatan resmi diplomatik yang berfokus pada tujuan mencapai kepentingan ekonomi negara pada tingkat internasional melalui kegiatan ekspor, investasi asing, dan berpartisipasi dalam organisasi ekonomi internasional.

Rana menyatakan bahwa diplomasi ekonomi menjadi proses sebuah negara berinteraksi dengan negara lain dalam usaha mencapai tujuan nasional negara dengan cara melakukan berbagai bentuk kegiatan, seperti melakukan perdagangan, investasi, dan wujud lainnya yang tentunya berkaitan dengan interaksi ekonomi (Bayne and Woolcock 2007). Untuk memudahkan memahami diplomasi ekonomi, Rana (2007) menjelaskan perkembangan diplomasi ekonomi pada negara berkembang yang dibagi menjadi beberapa indikator dalam menganalisis, diantaranya *economic salesmanship, Economic Networking and Advocacy Image Building* dan *Regulatory Management and Resource Mobilization*.

Dalam indikator pertama disebutkan bahwa *economic salesmanship* dapat dilaksanakan oleh presiden, kementerian luar negeri, Kementerian Perdagangan, duta besar maupun diplomat. Dengan kata lain, negara dapat mengirimkan para petinggi negara ke negara yang dituju. Kegiatan *salesmanship* dilakukan dengan memberikan penawaran atau menjual terhadap suatu produk. Kegiatan penawaran atau penjualan yang dilakukan oleh presiden, kementerian luar negeri, Kementerian Perdagangan, duta besar maupun diplomat dilaksanakan dengan memperkenalkan atau mempromosikan produk unggulan dalam negeri dengan memanfaatkan koneksi politik. *Economic salesmanship* menjadi fase awal yang sangat penting dalam praktik diplomasi ekonomi. Hal ini dikarenakan kegiatan ini dapat memberikan peluang ekonomi baik dalam bidang perdagangan maupun investasi.

Pada indikator kedua ini, negara berkembang tidak hanya melakukan promosi dan penjualan yang dilakukan oleh presiden, kementerian, duta besar atau diplomat saja. Namun sudah dilakukan penekanan pada kontributor ekonomi yang lebih luas seperti badan swasta, individu, maupun mitra lembaga yang lain. Di fase ini diharapkan para kontributor tersebut dapat memperluas jaringan ekonomi dan advokasi yang lebih luas sehingga penjangkauan promosi perdagangan dan investasi, akuisisi teknologi serta kegiatan ekonomi lainnya dapat memberikan dorongan yang lebih besar dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi.

Pada indikator ketiga ditekankan pada pembangunan citra yang baik dari negara. Tentunya dengan citra yang bagus dapat memperlancar kegiatan diplomasi ekonomi sehingga peluang kerjasama semakin besar. Pada indikator terakhir, diplomasi ekonomi sudah berfokus pada pengaturan regulasi, perundingan dan kesepakatan perjanjian perdagangan. Praktik diplomasi ekonomi yang melibatkan berbagai aktor tentunya membutuhkan regulasi atau aturan agar perdagangan dan investasi di tingkat bilateral, regional, dan multinasional dapat berjalan dengan baik. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat regulasi agar kepentingan ekonomi di luar negeri dapat maju. Dengan demikian, fase ini memudahkan aktor-aktor untuk melaksanakan diplomasi ekonomi.

Hasil dan Diskusi

Economic Salesmanship

Indonesia dan Tiongkok telah lama menjalin kerjasama perdagangan CPO. Kedua negara ini sama-sama saling membutuhkan untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing dalam perdagangan CPO. Tingginya permintaan Tiongkok terhadap CPO Indonesia membuat Indonesia menjadikan negara tersebut sebagai salah satu mitra terbesarnya dalam kegiatan ekspor CPO. Sejak tahun 1989 sampai sekarang, Indonesia tetap mengirimkan ekspor CPO ke Tiongkok. Hal ini lah yang juga menjadi penyebab kedua negara ini saling bergantung dalam perdagangan CPO. Perdagangan ekspor CPO yang dilakukan oleh Indonesia ke negara lain termasuk Tiongkok tentunya memiliki dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak negatif yang ditimbulkan CPO tentunya menjadi tantangan bagi negara Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara bersama KBRI Beijing dinyatakan bahwa:

“Perdagangan tersebut memiliki dampak positif dan negatif bagi Indonesia juga: sisi positif dapat menciptakan lapangan kerja untuk petani lokal, menghasilkan devisa dan menjalin hubungan perdagangan baik dengan Tiongkok. Dampak negatifnya lebih berupa tantangan berkaitan dengan komitmen Indonesia terhadap aksi-aksi perubahan iklim. Peningkatan permintaan akan kelapa sawit akan memberikan tantangan untuk produksi dan pengelolaan kelapa sawit secara berkelanjutan yang lebih besar. Untuk ini perlu dipastikan bahwa peningkatan produksi kelapa sawit tidak membuka lahan baru dan tidak merusak ekosistem. Pemerintah RI telah menerapkan moratorium pembukaan lahan baru untuk kelapa sawit. Karena itu, penting untuk terus mendorong inovasi (i.e. bibit berkualitas) dengan tingkat produksi tinggi dan pemanfaatan teknologi yang memadai” (KBRI Beijing 2023).

Selain itu, Eko Darmawansyah (Disperindag Kalbar) menyatakan bahwa:

“Dalam setiap kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi) pastilah akan memberikan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif nya. Dari nilai ekspor yang didapat tentunya kegiatan ekspor akan memberikan pemasukan berupa devisa kepada negara, membuka lapangan kerja, penggerak ekonomi daerah dan nasional, meningkatkan pendapatan daerah (PAD) dan kepada masyarakat petani/pengolah, serta manfaat lainnya. Sementara untuk sisi negatif nya jika tidak dikelola dan diawasi dengan baik maka akan mungkin timbul upaya penyelundupan/perdagangan ilegal terhadap produk CPO dan turunannya” (Darmawansyah 2023).

Berdasarkan wawancara diatas, perdagangan CPO yang dilakukan oleh Indonesia kepada Tiongkok dan negara lainnya akan menyumbang pendapatan negara. Ekspor CPO juga dapat memperkuat dan mempererat hubungan kerjasama dengan Tiongkok. Selain itu, ekspor CPO yang besar akan membuka lapangan kerja dan membantu meningkatkan pendapatan petani. Besarnya keuntungan yang didapat pada perdagangan CPO membuat Indonesia harus mempertahankan produksi perkebunan kelapa sawit. Namun, semakin besar perkebunan kelapa sawit maka akan berdampak negatif yang akan merusak ekosistem. Dengan demikian, pemerintah harus bekerjasama dengan perusahaan kelapa sawit maupun petani kelapa sawit agar peningkatan produksi CPO tidak berdampak pada lingkungan. Pemerintah juga harus bekerjasama dengan pihak keamanan agar tidak terjadi perdagangan ilegal terhadap produk CPO dan turunannya.

Pada indikator *economic salesmanship*, peneliti ingin melihat bagaimana aktor negara Indonesia berupaya melakukan diplomasi ekonomi dengan negara Tiongkok. Presiden, Kementerian Perdagangan dan KBRI Beijing menjadi pondasi penting bagi Indonesia untuk mempromosikan dan menjual CPO ke Tiongkok. Dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi, Indonesia akan mengadakan *Trade Expo* Indonesia (TEI) di setiap tahun. TEI merupakan pameran perdagangan terbesar Indonesia berskala internasional yang berfokus pada perdagangan *business to business* sambil mempromosikan pameran wisata dan investasi untuk produk dan layanan yang berorientasi ekspor (Kemlu 2022). TEI merupakan acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) selama lebih dari 30 tahun. Tujuan diadakannya TEI adalah untuk mempromosikan produk-produk ekspor Indonesia sehingga akan meningkatkan kinerja ekspor nasional (Soukotta 2023). TEI yang diselenggarakan oleh

Kementerian Perdagangan (Kemendag) selama lebih dari 30 tahun. Tujuan diadakannya TEI adalah untuk mempromosikan produk-produk ekspor Indonesia sehingga akan meningkatkan kinerja ekspor nasional (Soukotta 2023). TEI yang diselenggarakan oleh Kemendag telah mendatangkan keuntungan bagi Indonesia sebab melalui TEI maka terjadi penandatanganan kontrak dagang bersama *buyers* dari berbagai negara.

Dalam kegiatan tahunan TEI, Tiongkok selalu menempati 3 teratas negara yang memiliki nilai transaksi terbesar. Bahkan pada tahun 2020 sampai 2022, Tiongkok menjadi negara pertama dengan nilai transaksi terbesar. Pada tahun 2023, transaksi Tiongkok menurun sebanyak 47,75% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi yang terjadi di Tiongkok. Sepanjang TEI tahun 2019-2022, CPO selalu masuk dalam tiga besar produk yang paling diminati oleh para *buyer* berbagai negara. Tentunya *buyer* Tiongkok juga membeli CPO dalam jumlah yang besar. Tetapi tidak dipaparkan seberapa banyak *buyer* dari Tiongkok membeli CPO di tahun 2019, 2020, 2021, dan 2023. Hanya TEI di tahun 2022 terdapat pemaparan seberapa banyak *buyer* Tiongkok membeli CPO. Pada TEI 2022 tercatat bahwa pengusaha Tiongkok menandatangani kontrak dagang CPO dan turunannya sebanyak 2,5 juta ton (Kemendag 2022). Pembelian CPO tersebut ditandatangani oleh 9 pelaku usaha Indonesia dengan 13 pembeli Tiongkok binaan *China Chamber of Commerce for Import and Export for Foodstuffs, Native, Produce & Animal by Products* (CFNA). Penandatanganan pembelian CPO ini senilai USD 2,6 miliar. Penandatanganan ini dihadiri secara daring oleh Djauhari Oratmangun selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Beijing. KBRI Beijing bertugas mempromosikan dan meningkatkan intensitas jalinan kerjasama bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (Kemlu 2018). Pada TEI tahun 2023, produk CPO tidak masuk dalam 3 besar produk yang diminati (Rachmawati 2023). Oleh sebab itu, Kemendag bersama Pemerintah Indonesia akan bersinergi agar TEI di tahun berikutnya yaitu 2024, produk CPO kembali diminati oleh para pembeli mancanegara.

Selain Kemendag, pemimpin Indonesia yaitu Presiden Joko Widodo juga berperan penting dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi. Dalam upaya meningkatkan ekspor CPO ke Tiongkok, Jokowi turut mempromosikan CPO. Pada bulan Juli tahun 2022, Jokowi melakukan kunjungan ke Beijing. Kunjungan tersebut merupakan pertemuan bilateral dua negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Li Keqiang. Pertemuan ini membahas kerjasama bidang perdagangan, investasi, infrastruktur, keuangan, pendanaan, dan maritim. Dalam pertemuan ini juga Tiongkok berkomitmen untuk menambah impor CPO 1 juta ton dari Indonesia (Asmara 2022). Selain itu, Tiongkok juga akan memprioritaskan impor produk pertanian dari Indonesia.

Pada indikator *economic salesmanship*, terlihat bahwa Presiden, Kementerian Perdagangan, dan KBRI Beijing berperan penting dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok dalam kerjasama meningkatkan ekspor CPO pada tahun 2020-2023. Pada penjabaran mengenai TEI dapat disimpulkan bahwa TEI menjadi salah satu jembatan untuk melaksanakan diplomasi ekonomi Indonesia. TEI yang merupakan kegiatan tahunan Kementerian Perdagangan menjadi bukti bahwa kemendag berperan penting dalam upaya Indonesia meningkatkan berbagai produk ekspor maupun investasi di kancan mancanegara. Kemudian KBRI Beijing juga berperan penting dalam menghubungkan produsen CPO Indonesia dan *buyers* asal Tiongkok. KBRI Beijing juga memberikan informasi mengenai ketentuan dan syarat-syarat ekspor produk kelapa sawit dan turunannya di Tiongkok. Selain Kementerian Perdagangan dan KBRI Beijing, presiden menjadi aktor diplomasi ekonomi yang penting dalam aktivitas ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok. Pada tahun 2022, presiden Joko Widodo menawarkan CPO Indonesia di saat kunjungan ke Tiongkok. Penawaran tersebut menjadi bukti bahwa presiden turut melaksanakan diplomasi ekonomi dengan mempromosikan CPO sehingga terjadi pembelian 1 juta ton oleh Tiongkok.

Economic Networking and Advocacy

Kerjasama yang dilakukan oleh setiap negara tentunya memerlukan *stakeholder* agar dapat mengoptimalkan kerjasama yang dilakukan. Kerjasama perdagangan CPO Indonesia ke Tiongkok juga melibatkan berbagai *stakeholder*, dimana *stakeholder* ini membantu pemerintah Indonesia dalam kegiatan ekspor CPO. *Stakeholder* yang dimaksud dalam ekspor CPO adalah organisasi maupun para pebisnis yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), dan Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) merupakan *stakeholder* CPO Indonesia. Ketiga organisasi tersebut menjadi aktor diplomasi ekonomi Indonesia karena GAPKI, GIMNI, dan AIMMI merupakan wadah bagi para pengusaha kelapa sawit Indonesia untuk dapat menjual dan mengeksport minyak sawit di dalam maupun di luar negeri, termasuk ekspor ke Tiongkok. Dalam perjalanan mengenalkan CPO ke Tiongkok, GAPKI memiliki peranan yang sangat penting sebagai *stakeholder* CPO Indonesia. GAPKI seringkali mengikuti *event* maupun pertemuan terkait minyak kelapa sawit. GAPKI merupakan organisasi gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia yang didirikan pada 27 Februari 1981 (Gapki 2023).

Suci Cantika, Ully Nuzulian, Adibrata Iriansyah,
Nurfitri Nugrahaningsih, Dewi Suratiningsih

GAPKI sebagai aktor diplomasi ekonomi Indonesia terlihat dari berbagai kegiatan yang diikuti nya di kancah internasional. Pada tahun 2022, GAPKI menghadiri acara Trade Expo Indonesia ke-37 di Jakarta. Pada kegiatan ini terjadi penandatanganan antara pelaku usaha kelapa sawit Indonesia dengan pelaku usaha Tiongkok dalam meningkatkan ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok. GAPKI yang merupakan organisasi yang berisi perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit Indonesia turut menandatangani perjanjian tersebut. Selain itu, pada 26-28 Juli tahun 2023, Eddy Martono selaku ketua GAPKI, Sanny Anthony selaku wakil ketua GAPKI, dan Fadhil Hasan selaku ketua bidang hubungan luar negeri GAPKI telah mengikuti *The 14th China International Cereals and Oils Industry Summit* di Kunming, Tiongkok (Sawit Indonesia 2023).

Gambar 1. GAPKI Menghadiri The 14th China International Cereals and Oils Industry Summit



Sumber: Sawit Indonesia 2023

Pada acara tersebut, Eddy Martono mengatakan “Kami follow up MoU yang sudah ditandatangani akhir tahun lalu terkait impor minyak sawit oleh China sebesar 125 ribu ton lebih besar dibandingkan periode sama tahun 2022”. Kehadiran GAPKI pada kegiatan yang dilaksanakan di Tiongkok tersebut merupakan bentuk dari promosi yang dilakukan oleh aktor diplomasi dari Indonesia. Melalui promosi yang terus dilakukan, GAPKI meyakini dapat memenuhi dan meningkatkan ekspor CPO di Tiongkok. Pada kegiatan ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, APKASINDO dan GIMNI turut hadir untuk mempromosikan minyak sawit Indonesia (Sawit Indonesia 2023).

Selain organisasi pengusaha kelapa sawit, Indonesia memiliki perusahaan-perusahaan besar yang menjadi aktor diplomasi ekonomi Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini merupakan pengeksport minyak sawit Indonesia ke Tiongkok. Berdasarkan wawancara bersama KBRI Tiongkok dinyatakan bahwa:

“Perusahaan kelapa sawit memiliki peran penting dalam menjalin kerja sama bisnis, khususnya ekspor kelapa sawit dengan menjalin kerja sama dengan importir dan industri pengguna kelapa sawit dan turunannya di RRT. Perluasan koneksi dan hubungan baik dengan mitra-mitra di RRT penting untuk mendukung keberlanjutan dan perluasan ekspor kelapa sawit dan turunannya ke RRT” (KBRI Tiongkok 2023).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa perusahaan atau produsen minyak sawit juga berperan penting dalam diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok pada ekspor CPO. Perusahaan kelapa sawit yang melakukan promosi dan kerjasama bersama mitra di Tiongkok tentunya dapat memperluas jangkauan ekspor CPO Indonesia. Adanya perusahaan kelapa sawit juga akan mempermudah pemerintah untuk meningkatkan ekspor CPO. Dengan demikian, pemerintah Indonesia harus bersinergi bersama perusahaan atau produsen minyak sawit agar terjadi peningkatan volume ekspor CPO di Tiongkok.

Selain perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan Indonesia yang telah memiliki cabang perusahaan kelapa sawit di Tiongkok. Perusahaan-perusahaan yang dimaksud adalah Apical Group, Musim Mas, Wilmar, Sinar Mas, dan Astra Agro Lestari (Jati 2022).

Tabel 1. Daftar Kilang dan Pabrik Milik Perusahaan Sawit Indonesia di Tiongkok

Nama Perusahaan	Volume Ekspor dalam Ton (2019-2021)	Jumlah Kilang dan Pabrik Pengolahan Minyak di Tiongkok
Apical/Royal Golden Eagle	3.173.567	1 Kilang, Excelic Food Technology
Musim Mas	2.105.403	1 Kilang dan Fraksinasi, Musim Mas (Tianjin) Oils & Fats 1 Kilang, Musim Mas (Zhenjiang) Oils & Fats Industrial 1 Marketing Office, Shanghai Continental
Wilmar	2.039.146	58 Kilang Minyak, 12 Pabrik Oleokimia,
Sinar Mas	1.495.422	1 Kilang, Shining Gold Foodstuffs Ningbo 1 Kilang, Zhuhai Shining Gold Oil and Fats Industry Co
Astra Agro Lestari	1.038.375	-

Sumber: *World Resources Institute* Indonesia 2022

Dari data tabel di atas, diketahui bahwa perusahaan-perusahaan besar Indonesia yang melakukan ekspor minyak sawit juga memiliki kilang atau pabrik di Tiongkok. Tentunya dengan adanya kilang atau pabrik yang dibangun akan memudahkan para pengekspor CPO untuk melancarkan aktivitas perdagangan di Tiongkok. Tabel di atas menunjukkan selama tahun 2019-2021, perusahaan Apical merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang paling banyak mengekspor minyak sawit dan perusahaan Wilmar menjadi perusahaan yang memiliki kilang minyak sawit terbanyak di Tiongkok. Hingga saat ini, perusahaan-perusahaan tersebut tetap aktif mengekspor minyak sawit ke Tiongkok dan beberapa negara lainnya. Adanya perusahaan-perusahaan tersebut menjadi bentuk diplomasi ekonomi Indonesia dalam perdagangan CPO di Tiongkok.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang berperan penting dalam indikator *economic networking and advocacy* pada diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok dalam kerjasama meningkatkan ekspor CPO adalah GAPKI, GIMNI, AIMMI, APKASINDO, dan perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit. Keikutsertaan

organisasi kelapa sawit pada pertemuan skala internasional seperti *The 14th China International Cereals and Oils Industry Summit* tersebut dapat membantu pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan ekspor CPO di Tiongkok. Adanya *stakeholder* kelapa sawit juga telah membantu pemerintah dalam memperluas jangkauan ekspor. Pemerintah dan *stakeholder* hendaknya terus bekerjasama untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas CPO sehingga Indonesia dapat terus meningkatkan volume ekspor CPO di Tiongkok.

Image Building

Salah satu indikator yang penting untuk memperlancar diplomasi ekonomi ke negara lain adalah suatu negara harus membangun citra yang baik dalam hubungan internasional. Citra yang baik dari negara akan mempengaruhi kerjasama yang dilakukan dengan negara lain. Pembangunan citra yang baik tentu tidak mudah sebab selalu akan ada celah dari negara lain untuk memandang bagaimana posisi negara tersebut dalam dunia internasional. Seperti halnya pada citra perkebunan kelapa sawit. Indonesia harus bersikeras untuk membangun citra yang baik pada perkebunan kelapa sawit agar para importir tidak beralih dari minyak sawit.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkebunan kelapa sawit Indonesia dipandang buruk oleh beberapa negara khususnya Uni Eropa. Pada 4 April 2017, parlemen Uni Eropa menetapkan kebijakan mengenai CPO yang berisi diskriminasi terhadap industri kelapa sawit seperti kelapa sawit mempekerjakan atau mengeksploitasi anak-anak, pelanggaran HAM, korupsi, penyebab deforestasi dan kerusakan alam (Amelia 2023). Tentunya citra yang buruk yang diberikan oleh Uni Eropa pada perkebunan kelapa sawit Indonesia akan mempengaruhi aktivitas ekspor CPO dan turunannya ke negara lain.

Menurut hasil wawancara bersama Ibu Inke Hilarie selaku Fungsional Diplomat Ahli Madya, Unit Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia:

“Dengan banyaknya kampanye negatif yang dilancarkan oleh negara-negara di kawasan tertentu terhadap minyak kelapa sawit, maka untuk menghadapi tantangan tersebut, kita perlu melancarkan sebuah narasi pengarusutamaan minyak nabati berkelanjutan (*Sustainable Vegetable Oils/VSO*) yang berbasis fakta dan bukti empiris dan menggunakan pendekatan tiga aspek *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu

minyak kelapa sawit memiliki nilai ekonomi yang baik, nilai sosial yang baik, dan mempunyai nilai-nilai yang mengutamakan aspek lingkungan hidup secara inklusif, holistik, dan non-diskriminasi” (Hilarie 2024).

Berdasarkan wawancara di atas, dalam menghadapi kampanye negatif maka Indonesia harus dapat memberikan bukti yang berdasarkan penelitian ilmiah bahwa minyak kelapa sawit memiliki nilai yang baik. Indonesia harus memberikan bukti bahwa tuduhan Uni Eropa terkait kelapa sawit Indonesia tidaklah benar. Indonesia harus memberikan fakta bahwa perkebunan kelapa sawit Indonesia dapat mensejahterakan dan membantu kehidupan banyak orang. Namun hingga sekarang, Indonesia masih kurang dalam memberikan pernyataan secara resmi ke dunia internasional bahwa perkebunan kelapa sawit tidak seburuk seperti yang dituduhkan oleh Uni Eropa.

Adanya perkebunan kelapa sawit telah menjadi kontroversi karena menyebabkan deforestasi dan hilangnya ekosistem alami (Suratiningsih dkk 2024). Perkebunan kelapa sawit dianggap telah merusak ekosistem dan kawasan hutan Sumatera dan Kalimantan. Polemik lingkungan dalam perluasan kelapa sawit menjadi salah satu indikator argumentasi negatif importir asal Uni Eropa (Pramana 2021). Indonesia dianggap telah merusak lingkungan hidup sehingga untuk menekan pengurangan perluasan kelapa sawit, maka harus mengurangi konsumsi minyak kelapa sawit. Kampanye negatif yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap industri kelapa sawit Indonesia tentunya akan merugikan Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia sangat berupaya untuk menghilangkan citra negatif tersebut. Adapun upaya yang dilakukan dalam pemerintahan Jokowi untuk menghadapi kampanye negatif CPO oleh Uni Eropa sepanjang tahun 2017-2020 adalah membuat sertifikat ISPO serta melakukan industrialisasi komoditas CPO menjadi produk olahan (Alen et al. 2021). Selain itu, Indonesia juga mengadakan *event* untuk edukasi kelapa sawit dalam menghadapi *black campaign* oleh Uni Eropa. Pada November tahun 2023, Pemerintah Indonesia bersama Yayasan Minyak Sawit Berkelanjutan Spanyol mengadakan seminar *Epistemic Community and Market Forum (ECMF) on Sustainable Vegetable Oil* di Madrid. Pada acara seminar tersebut, narasumber dari Indonesia yaitu Dr. Musdhalifah dari Kementerian Perekonomian RI menjelaskan bahwa dari 189 juta ha luas daratan Indonesia, hanya 7,4 persen yang digunakan sebagai perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit hanya beroperasi 16,48 juta ha dengan 41,3 persen merupakan perkebunan milik petani kecil. Dr. Musdhalifah juga menjelaskan pada tahun 2022 industri sawit menyumbang 10,2 persen ekspor Indonesia dan telah berkontribusi dalam lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Industri kelapa sawit

menciptakan 5,5 juta lapangan kerja di industri kelapa sawit (Kemlu 2023). Oleh sebab itu, industri perkebunan harus selalu dilakukan sebab apabila dihentikan maka akan memperbanyak pengangguran dan memutuskan harapan hidup orang banyak.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, Indonesia berupaya untuk membangun citra yang baik pada perkebunan kelapa sawit. Pembangunan citra yang baik dilakukan agar negara pengimpor CPO tidak berpindah ke minyak nabati yang lainnya. Untuk membangun citra positif perkebunan kelapa sawit maka Indonesia telah melakukan beberapa usaha diantaranya dengan membuat sertifikat ISPO, industrialisasi komoditas CPO menjadi produk olahan, dan mengadakan seminar terkait kelapa sawit. Tentunya membangun citra yang positif kelapa sawit memerlukan perjuangan yang lebih keras lagi dikarenakan Uni Eropa masih mengkampanyekan catatan negatif perkebunan kelapa sawit. Untuk itu, pemerintah dan *stakeholder* harus bersinergi dalam menyerukan nilai-nilai baik perkebunan kelapa sawit sehingga Uni Eropa tidak memiliki pemikiran negatif terhadap perkebunan kelapa sawit Indonesia. Usaha-usaha Indonesia yang ingin memperbaiki citra negatif industri kelapa sawit merupakan langkah yang tepat sehingga negara lain yang mengimpor CPO dari Indonesia tidak memboikot minyak sawit Indonesia. Walaupun saat ini Tiongkok tidak terpengaruh oleh kampanye hitam kelapa sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa, namun tetap saja Indonesia harus memberikan perlawanan terhadap kampanye hitam tersebut agar negara pengimpor CPO Indonesia termasuk Tiongkok dapat mempercayai bahwa CPO Indonesia merupakan CPO yang berkualitas dan bermanfaat bagi orang banyak. Dengan demikian, diharapkan negara pengimpor CPO dari Indonesia termasuk Tiongkok tidak akan menghentikan impor CPO nya.

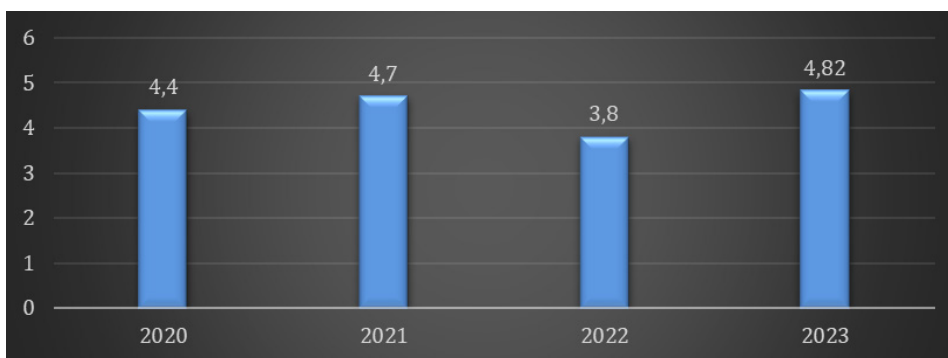
Regulatory Management and Resource Mobilization

Dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi, pengaturan regulasi dan kesepakatan dalam perdagangan menjadi salah satu hal yang sangat penting. Adanya aturan dalam kegiatan perdagangan akan memudahkan para aktor untuk ikut dalam perdagangan. Oleh sebab itu, dua negara atau lebih yang memiliki hubungan kerjasama harus memiliki regulasi atau perjanjian baik pada sektor perdagangan, pendidikan, maupun budaya. Adanya regulasi yang disepakati oleh kedua belah pihak maka jalinan kerjasamanya akan mendatangkan keuntungan.

Pada kerjasama Indonesia dan Tiongkok, khususnya pada kegiatan ekspor CPO terlihat sudah sangat bagus. Dari tahun 1990-an hingga sekarang, ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok sangat meningkat. Pada awal kerjasamanya di tahun 1989, Tiongkok mengimpor CPO hanya sebanyak 500 ton saja, namun sekarang telah meningkat hingga mencapai jutaan ton impor CPO. Seiring waktu, perkembangan ekspor CPO terus meningkat sebab kebutuhan industri di Tiongkok yang tinggi. Peningkatan ekspor CPO mencapai jutaan ton dimulai sejak adanya regulasi dan perjanjian perdagangan perjanjian *Free Trade Area* (FTA). Perjanjian ACFTA merupakan salah satu kesepakatan perdagangan bebas yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok yang sudah diberlakukan lebih dari satu dekade (Saphira et al. 2022).

Perjanjian atau kesepakatan ACFTA telah memberikan dampak yang signifikan bagi perdagangan negara-negara ASEAN dan Tiongkok, termasuk diantaranya negara Indonesia. Melalui kerjasama ACFTA, Indonesia dan Tiongkok sama-sama merasakan keuntungan, dimana kerjasama ACFTA telah mendorong penurunan tarif bea masuk seperti pada komoditi karet alam, CPO, kopi, dan Coklat. Manfaat utama ACFTA baik bagi Indonesia dan Tiongkok adalah adanya penghapusan tarif sebesar 94,6% dari semua jalur tarif untuk ekspor asal Indonesia ke Tiongkok (Kemendag 2019). Oleh sebab itu, peningkatan ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok meningkat pesat setelah adanya ACFTA.

Tabel 2. Ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok Setelah ACFTA



Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok telah mencapai jutaan ton. Peningkatan ekspor CPO yang mencapai jutaan ton dimulai setelah adanya regulasi dan perjanjian perdagangan ACFTA. Peningkatan jumlah ekspor CPO ini didukung juga oleh pertumbuhan industri di Tiongkok yang semakin banyak. Industri Tiongkok banyak

sekali menggunakan CPO baik itu untuk bahan makanan dan non makanan. Perkembangan ekspor CPO ini sangat menguntungkan bagi Indonesia sebab Indonesia yang memiliki kelebihan produksi CPO harus mencari pasar yang strategis untuk perdagangan CPO.

Selain regulasi dalam ACFTA, Indonesia menetapkan regulasi terkait ekspor CPO dan turunannya terhadap negara Tiongkok dan lainnya yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein*, dan *Used Cooking Oil*. Selain itu, untuk mengurangi tarif bea masuk di Tiongkok maka produsen harus menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) *Form E* yang dikeluarkan oleh menteri perdagangan dan pejabat yang ditunjuk oleh menteri perdagangan, salah satunya disperindag. SKA *Form E* atau *certificate of origin* mulai diberlakukan sejak 14 Agustus 2020 (Kemendag 2021). SKA merupakan dokumen yang menjadi bukti bahwa barang ekspor tersebut berasal dari Indonesia dan telah memenuhi Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*). Dengan kata lain, SKA merupakan bentuk dari sertifikasi asal barang yang menyatakan produk atau komoditas tersebut berasal, dihasilkan, dan diolah di Indonesia.

Setelah memenuhi persyaratan dan regulasi dari pemerintah Indonesia, pelaku usaha ekspor CPO juga harus memenuhi persyaratan dan regulasi dari pemerintah Tiongkok. Saat ini, pemerintah Tiongkok mewajibkan adanya Sertifikat *General Administration of Customs of the People's Republic of China* (GACC). Syarat ini mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2022. Peraturan mengenai keharusan kepemilikan sertifikat GACC bagi para eksportir yang masuk ke Tiongkok telah diatur dalam Keputusan GACC Nomor 248 terkait Peraturan Republik Rakyat Tiongkok tentang Pendaftaran dan Administrasi Produsen Makanan Impor Luar Negeri. Pada pasal 15 dalam peraturan GACC tertulis bahwa produsen yang terdaftar wajib mencantumkan nomor registrasi Tiongkok atau nomor registrasi yang disetujui oleh otoritas kompeten negara/wilayah pengekspor pada kemasan dalam dan luar pangan yang diekspor ke Tiongkok (Eusme centre 2021).

Secara khusus, Tiongkok juga melakukan penetapan peraturan untuk standarisasi CPO yang masuk ke negaranya. Tiongkok menetapkan minyak kelapa sawit yang masuk merupakan minyak kelapa sawit yang bersertifikat RSPO atau setidaknya memiliki sertifikat standar di negara tersebut. Indonesia juga telah mewajibkan kepada seluruh produsen

minyak kelapa sawit Indonesia untuk memiliki sertifikat ISPO. Selain itu, Tiongkok juga menetapkan beberapa standar untuk impor CPO yang dikonsumsi untuk manusia seperti pertama, standar minyak kelapa sawit ekstrak berasal dari spesies Afrika (*Elaeis Guineensis Jacq*), bukan berasal dari spesies Amerika (*Elaeis Oleifera*) dan pengembangbiakannya (Kemendag t.t). Diketahui bahwa, kelapa sawit yang ditanam di Indonesia berasal dari Afrika (Gapki 2023). Tentunya standar ini akan menguatkan posisi CPO Indonesia di Tiongkok sebab kelapa sawit yang ditanam di Indonesia bukan berasal dari Amerika. Standar lainnya yang digunakan oleh Tiongkok adalah standar higienitas minyak nabati untuk konsumsi, standar higienitas bahan aditif makanan, standar kesehatan minyak nabati untuk dikonsumsi, CPO tidak diperbolehkan memiliki campuran dari minyak konsumsi lainnya dan tidak boleh ditambah bahan perasa atau bahan pengharum apapun, produk yang menampilkan nama minyak kelapa sawit harus menjelaskan status sebagai CPO atau minyak olahan (Kemendag t.t). Lalu untuk kemasan produk CPO harus khusus, bersih, kering dan rapat menutup. Kemasan minyak olahan harus memenuhi standar kesehatan dan keamanan, bahan pelindung atau pelapis harus bebas dari bahan timbal, bahan besi dan menggunakan bahan tidak beracun. Selain itu, standar penyimpanan dan transportasi juga penting, dimana CPO berada pada suhu rendah, kering, bersih, tidak terkena cahaya langsung dan dipisahkan dari bahan yang dapat meracuni, mengotori atau merusak. Transportasi juga harus memenuhi syarat kebersihan dan kesehatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada indikator *regulatory management and resource mobilization*, Indonesia dan Tiongkok memiliki regulasi dan perjanjian terkait perdagangan minyak sawit atau CPO. Perjanjian ACFTA menjadi awal dari penurunan tarif bea masuk yang membuat ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok menjadi meningkat. Perjanjian perdagangan juga terlihat dari pembelian 1 juta ton CPO oleh Tiongkok. Selain itu, Indonesia dan Tiongkok masing-masing memiliki regulasi terkait perdagangan CPO. Indonesia memiliki regulasi yang tercantum dalam keputusan menteri perdagangan dan peraturan menteri perdagangan untuk menjamin mutu dan kualitas minyak sawit Indonesia. Indonesia menetapkan setiap produsen minyak sawit untuk memiliki *Certificate of Origin* apabila ingin mengurangi tarif bea masuk di Tiongkok. Kemudian, Tiongkok juga memiliki regulasi bahwa produsen CPO Indonesia harus memiliki sertifikat *General Administration of Customs of the People's Republic of China* (GACC) yang di dapat dari badan bea cukai nasional Tiongkok. Tiongkok juga menetapkan standarisasi terhadap CPO yang masuk ke negaranya sehingga eksportir minyak sawit harus menyesuaikan standar Tiongkok. Dengan demikian, eksportir CPO asal Indonesia atau

produsen minyak sawit harus dapat memenuhi regulasi dari Indonesia dan Tiongkok agar aktivitas ekspor CPO Indonesia ke Tiongkok dapat berjalan dengan lancar.

Kesimpulan

Diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok dalam perdagangan ekspor CPO telah menunjukkan potensi yang besar keberhasilan pemerintah dalam upaya meningkatkan ekspor CPO. Hal ini dikarenakan Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang terbesar bagi Indonesia. Dari data yang telah ditampilkan terlihat ekspor CPO Indonesia telah mencapai jutaan ton. Tentunya hal tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia karena kegiatan ekspor ini akan menambah pendapatan devisa negara. Kemudian dari hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok dalam kegiatan ekspor CPO sudah terbilang cukup baik. Pemerintah, Kementerian Perdagangan, KBRI Beijing dan *stakeholder* telah menjalankan tugas nya masing-masing dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi ke Tiongkok untuk meningkatkan ekspor CPO. Namun, Pemerintah, Kementerian Perdagangan, KBRI Beijing, dan *stakeholder* harus lebih gencar mempromosikan CPO Indonesia ke Tiongkok karena di tahun 2020-2023 masih terdapat naik turun volume ekspor CPO.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni wawancara kepada narasumber Atase Perdagangan dan Fungsi Ekonomi KBRI Beijing hanya dilakukan melalui email sehingga sulit untuk bertanya lebih mendalam terkait kegiatan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok dalam kerjasama ekspor CPO. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk meneliti kebijakan negara Tiongkok dalam melakukan impor CPO dari Indonesia.

Referensi

Buku

- Abdussamad, Z., 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Baranay, P., 2009. *Modern Economic Diplomacy*. Latvia: Publications of Diplomatic Economic Club.
- Bayne, Nicholas and Woolcock S., 2007. *The New Economic Diplomacy: Decision Making and Negotiation in International Economic Relations*. London: Ashgate.
- Harahap, N., 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Nora, S. and Carolina, D. M. 2018. *Budidaya Tanaman Kelapa Sawit*. Jakarta Selatan: Pusat Pendidikan Pertanian.
- Rana, K. S., 2007. *Economic Diplomacy: The Experience of Developing Countries*. New Delhi: Ashgate.

Artikel Jurnal

- Alen, V. P. L, et al., 2021. “Upaya Presiden Jokowi Dodo Dalam Menghadapi Penolakan Ekspor Komuditas CPO (Crude Palm Oil) Oleh Uni Eropa Pada Tahun 2017-2020”, *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1): 110–31.
- Amelia, J., 2023. “Respon Indonesia Menghadapi Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa Terhadap Produk CPO (Crude Palm Oil) (CPO) Indonesia”, *Jurnal JOM Fisip*, 10(1): 1-11.
- Pramana, A., 2021. “Penerapan Pembangunan Berkelanjutan Uni Eropa Dalam Ekspor Minyak Sawit Indonesia Tahun 2009-2019”, *Global Political Studies Journal*, 5(1): 62-73.
- Ramadhaningtyas, et al., 2021. “Analisis Implementasi South-South Cooperation Terhadap Upaya Peningkatan Pembangunan Manusia di Argentina”, *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, 13(2): 77-99.
- Saphira, K. et al., 2022. “Kerja Sama Pertanian Indonesia Dengan Tiongkok Dalam Kerangka ACFTA”, *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2): 109-123.

Suratiningsih, D. et al., 2024. "Implementation of the Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) Policy on Oil Palm Plantations in West Kalimantan", *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(1): 10-22.

Artikel Daring

Annur, C. M., 2024. "Ini Negara Tujuan Utama Ekspor Sawit Indonesia Pada 2023" [Online]. Dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/05/ini-negara-tujuan-utama-ekspor-sawit-indonesia-pada-2023#:~:text=Sepanjang%202023%20India%20menjadi%20negara,US%244%2C1%20miliar> [diakses pada 12 Maret 2024].

Asmara, C. G., 2022. "Jokowi Bawa Oleh-Oleh: China Komitmen Impor 1 Juta Ton CPO RI" [Online]. Dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220726155604-4-358712/jokowi-bawa-oleh-oleh-china-komitmen-impor-1-juta-ton-cpo-ri> [diakses pada 27 Februari 2024].

Eusme Centre, 2021. "All You Need to Know About Gacc Single Window Registration for F&B Manufacturers" [Online]. Dalam <https://www.eusmecentre.org.cn/publications/all-you-need-to-know-about-gacc-single-window-registration-for-fb-manufacturers/> [diakses pada 27 Maret 2024].

Gapki., 2023. "Apa Itu Gapki" [Online]. Dalam <https://gapki.id/apa-itu-gapki/> [diakses pada 25 September 2024].

Gapki., 2023. "Opinion: China Seeking To Grow Palm Oil; At Home Or Abroad" [Online]. Dalam <https://gapki.id/en/news/2023/02/10/opinion-china-seeking-to-grow-palm-oil-at-home-or-abroad/> [diakses pada 7 Januari 2024].

Info Sawit, 2024. "Produksi Minyak Sawit Indonesia 2023 Meningkatkan 7,15 persen, Ekspor ke Uni Eropa Melorot" [Online]. Dalam <https://www.infosawit.com/2024/03/02/produksi-minyak-sawit-indonesia-2023-meningkat-715-persen-ekspor-ke-uni-eropa-melorot/amp/> [diakses pada 5 Maret 2024].

Jati, E. S. K., 2022. "Menelusuri Perjalanan Minyak Sawit dari Indonesia ke Tiongkok" [Online]. Dalam <https://wri-indonesia.org/id/insights/tracing-palm-oil-journey-indonesia-tiongkok> [diakses pada 25 Agustus 2023].

Kemendag, 2019. “ACFTA” [Online]. Dalam <https://ftacenter.kemendag.go.id/acfta> [diakses pada 5 Maret 2024].

Kemendag, 2021., “Indonesia Electronic Certificate of Origin”, *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*” [Online]. Dalam https://e-ska.kemendag.go.id/home.php/home/news_detil/808 [diakses pada 5 Mei 2024].

Kemendag, 2022. “Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Perdagangan dan Kontrak Dagang Produk Pertanian dan Perikanan Antar Pelaku Usaha Indonesia dan Tiongkok” [Online]. Dalam <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/penandatanganan-nota-kesepahaman-kerja-sama-perdagangan-dan-kontrak-dagang-produk-pertanian-dan-perikanan-antara-pelaku-usaha-indonesia-dan-tiongkok>. [diakses pada 25 Januari 2024].

Kemendag, t.t., “Ekspor Minyak Sawit ke Tiongkok” [Online]. Dalam <https://inatrimis.kemendag.go.id/content/persyaratan-mutu-minyak-sawit-tiongkok> [diakses pada 5 Mei 2024].

Kementan, 2023. “Pertahankan Eksistensi Sawit, Perkuat Kemitraan dan Kolaborasi Multipihak” [Online]. Dalam <https://ditjenbun.pertanian.go.id/pertahankan-eksistensi-sawit-perkuat-kemitraan-dan-kolaborasi-multipihak/> [diakses pada 25 September 2024].

Kemlu, 2022. “Peresmian Trade Expo Indonesia ke-37” [Online]. Dalam [https://kemlu.go.id/caracas/id/news/21500/peresmian-trade-expo-indonesia-ke-37#:~:text=Trade%20Expo%20Indonesia%20\(TEI\)%20adalah,produk%20dan%20layanan%20berorientasi%20ekspor](https://kemlu.go.id/caracas/id/news/21500/peresmian-trade-expo-indonesia-ke-37#:~:text=Trade%20Expo%20Indonesia%20(TEI)%20adalah,produk%20dan%20layanan%20berorientasi%20ekspor) [diakses pada 12 February 2024].

Kemlu, 2018. “Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing, Republik Rakyat Tiongkok” [Online]. Dalam https://www.kemlu.go.id/beijing/id/pages/tentang_pelayanan_perwakilan/2381/etc-menu [diakses pada 12 September 2024].

Pratiwi, F., 2023. “Produksi Minyak Sawit Lesu Sepanjang 2022, Ini Sebabnya” [Online]. Dalam <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rp2xxg457/produksi-minyak-sawit-lesu-sepanjang-2022-ini-sebabnya#:~:text=Ia%20memaparkan%2C%20penurunan%20produksi%20CPO,minyak%20bumi%20yang%20sangat%20tinggi> [diakses pada 12 September 2023].

- Putri, A. M. H., 2023. "Jalan Terjal Produksi CPO, Turun 3 Tahun Terakhir" [Online]. Dalam <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230202130002-128-410410/jalan-terjal-produksi-cpo-turun-3-tahun-terakhir> [diakses pada 27 September 2023].
- Putri, A. S., and Nibras, N. N., 2019. "Kerja sama Internasional: Pengertian, Alasan, dan Tujuannya" [Online]. Dalam <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/18/170000569/kerja-sama-internasional-pengertian-alasan-dan-tujuan> [diakses pada 27 September 2023].
- Rachmawati, S., 2023. "Transaksi Trade Expo 2023 Tembus Rp473 Triliun, Kadin Beri Catatan" [Online]. Dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20231220/12/1725726/transaksi-trade-expo-2023-tembus-rp473-triliun-kadin-beri-catatan> [diakses pada 21 September 2024].
- Sadya, S., 2023. "Indonesia Mendominasi Produksi Minyak Sawit Dunia pada 2022" [Online]. Dalam <https://dataindonesia.id/agribisnis-kehutanan/detail/indonesia-mendominasi-produksi-minyak-sawit-dunia-pada-2022> [diakses pada 24 Agustus 2023].
- Sawit Indonesia, 2023. "Gapki Optimis Ekspor Sawit Indonesia ke China Capai 7 Juta Ton" [Online]. Dalam <https://sawitindonesia.com/gapki-optimis-ekspor-sawit-indonesia-ke-china-capai-7-juta-ton/> [diakses pada 24 Januari, 2023].
- Soukotta, Z. A., 2023. "Trade Expo Indonesia, Mengenal Pameran Terbesar di Indonesia" [Online]. Dalam https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/trade-expo-indonesia-mengenal-pameran-dagang-terbesar-di-indonesia#google_vignette [diakses pada 15 September 2024].
- Yifan, J., 2022. "Will China Produce Its Own Palm Oil?" [Online]. Dalam <https://www.sixthtone.com/news/1011402> [diakses pada 10 Agustus 2023].

Interview

- Atase Perdagangan dan Fungsi Ekonomi KBRI Beijing, 2024. Interview with author on 29 December 2023. Online [Email message in possession of author].
- Darmawansyah, Eko, 2023. Interview with author on 17 December 2023. Online [Whatsapp messages in possession of author].
- Dinesia, Inke Hilarie, 2024. Interview with author on 2 January 2024. Online [Cassette recording in possession of author].